



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya-upaya Diplomasi Pembangunan Australia
Terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Gracia Yobel Galilea

2015330116

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya-upaya Diplomasi Pembangunan Australia
Terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan

Skripsi

Oleh

Gracia Yobel Galilea

2015330116

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

Bandung

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gracia Yobel Galilea

NPM : 2015330116

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya-upaya Diplomasi Pembangunan Australia Terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Juli 2019

Gracia Yobel Galilea

ABSTRAK

Nama : Gracia Yobel Galilea
NPM : 2015330116
Judul : Upaya-upaya Diplomasi Pembangunan Australia Terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan

Program bantuan dari negara maju terhadap masyarakat di negara-negara kurang makmur pada kenyataannya bukan hanya ditunjukkan sebagai ungkapan niat baik, tapi juga sebagai cara untuk mempromosikan citra negara dan menggenapi agenda politik luar negeri. Fenomena tersebut menjadi landasan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi pembangunan Australia terhadap Nauru dalam bidang pendidikan?”**. Nauru merupakan negara republik terkecil di dunia, oleh sebab itu bekal edukasi kepada masyarakat adalah bentuk motor penggerak untuk menciptakan perekonomian mandiri dan berkelanjutan.

Analisis dilandaskan pada kerangka teori Diplomasi Pembangunan yang merupakan jenis khusus dari kegiatan Diplomasi Publik. Sebagai pelengkap, peneliti turut menyertakan konsep Diplomasi Multijalur untuk menganalisa aktor-aktor yang terlibat pada tiap program. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka, dengan referensi dari buku, jurnal, dokumen, laporan, dan sumber lainnya. Kajian dibatasi pada kurun waktu 2013-2018.

Rumusan upaya-upaya yang dirancang oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia bekerjasama dengan aktor lainnya diimplementasikan dalam program Pendidikan untuk Guru Nauru, Penghargaan Beasiswa Australia, Pendirian Desa Belajar Nauru, serta Penempatan Penasehat Teknis untuk Membantu Kementerian Pendidikan Nauru. Korelasi keseluruhan aspek mengerucut pada kesimpulan bahwa upaya-upaya bantuan pendidikan tersebut masih mengandung kekurangan dari aspek publikasi media. Namun dampaknya terhadap publik berhasil tersampaikan secara relevan, efektif, dan efisien.

Kata kunci: Australia, Nauru, diplomasi pembangunan, pendidikan, DFAT

ABSTRACT

Name : Gracia Yobel Galilea
NPM : 2015330116
Title : *Australia's Development Diplomacy Efforts towards Nauru in Field of Education*

*Programmes of aid extended towards less affluent countries are increasingly considered not only as an expression of goodwill, but also as a way to promote a positive image of a state and to fulfill foreign policy agenda. This phenomenon used as a basis for researcher to answer research question “**How are Australia’s development diplomacy efforts towards Nauru in field of education?**”. Nauru is the smallest republican country in the world, hence the provision of education for the society is considered as a driving force to create an autonomous and sustainable economy.*

The analysis relies within a theoretical framework of Development Diplomacy; one of the specific type of Public Diplomacy activity. As a complement, researcher also includes Multitrack Diplomacy concept to analyze the actors involved in each programs. Research is conducted by literature review method using references from books, journals, documents, reports, and other sources. Analysis is limited to the period of 2013-2018.

Efforts formulated by Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in collaboration with other actors are implemented in the Nauru Teacher Education Project, Australia Awards Scholarship, Establishment of Nauru Learning Village, and Placement of Technical Advisors to Assist Nauru Ministry of Education. The correlation of all aspects converges on the conclusion that education aids is still hampered by a lack of media publication. However the impact on the public has been conveyed in a relevant, effective, and efficient manner.

Keyword: Australia, Nauru, development diplomacy, education, DFAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat bimbinganNya, penulis dapat berproses dan menyelesaikan penelitian ilmiah. Penulis juga berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan semua pihak kepada penulis selama proses penulisan hingga selesainya penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Upaya-upaya Diplomasi Pembangunan Australia Terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan”.

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sukawarsini Djelantik selaku dosen yang telah membimbing saya dalam penyusunan penelitian ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih ditujukan kepada orang tua serta sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan penuh. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini agar membuatnya menjadi berguna di masa yang akan datang. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Bandung, 6 Juli 2019

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima doa, bimbingan, petunjuk, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

1. Tuhan Yesus atas berkat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Saya untuk keteguhan hati berproses semasa masa perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai. Belum sempurna, tapi kiranya itu yang menjadi alasan untuk terus menempa diri belajar lebih baik.
3. Mami, Papi, Angel, Josefin yang senantiasa setia mendukung dalam doa, kasih sayang, semangat, serta perhatian sedari awal hingga saat ini. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Sukawarsini Djelantik Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan masukan, kritik, saran, dorongan, dan semangat kepada peneliti sampai akhirnya skripsi ini rampung tepat waktu.
5. Segenap dosen yang turut membantu, memberi masukan, dan menguji penulisan skripsi ini. Terima kasih sedalam-dalamnya juga atas ilmu dan pelajaran kehidupan yang dicurahkan dengan tulus.

6. *These special people, my backup support*; Adam Amora, Satria Yuma, Kenny Nathane, Geraldi, Esy Gracia, Valentina Sari, Jessica Andriani, Septiviana Thomson, Brigette Giovandreta, Jazebel, dan Andrew Adusa. Terimakasih sudah hadir dalam perjalanan naik turunnya kehidupan perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan skripsi #2019 S.Hub.Int serta teman-teman bimbingan; Sannia, Rara, Tania, Icha, Ka Masya, Jeanet, Vieronicha. Motivasi, semangat, curhatan, saran, dan kritik kalian sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Selamat juga untuk kesuksesan kalian, selamat melangkah lebih tinggi!
8. Serta masih banyak lagi pihak tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi penelitian selanjutnya. Doa terbaik untuk semua pihak yang telah membantu, *God bless you! xo.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.7 Sistematika Pembahasan	23
BAB II RELASI AUSTRALIA DENGAN NEGARA KEPULAUAN PASIFIK SELATAN	24
2.1 Keterlibatan Australia di Kawasan Pasifik Selatan	25
2.1.1 Pembentukan Organisasi Kawasan – <i>Pacific Island Forum</i> (PIF)	29
2.1.2 Agenda Strategis Pacific Island Forum (PIF) – The Pacific Plan	30
2.1.3 Posisi dan Kepentingan Australia dalam <i>Pacific Island Forum</i> (PIF)	31
2.2 Sejarah Hubungan Diplomatik Australia dengan Nauru	33
2.2.1 <i>The Pacific Solution</i> – Perjanjian Pendirian <i>Detention Centre</i>	37
2.2.2 Nauru and Australia Partnership for Development (2005-2025)	39
BAB III UPAYA-UPAYA DIPLOMASI PEMBANGUNAN AUSTRALIA TERHADAP NAURU DALAM BIDANG PENDIDIKAN	42
3.1. Menyelenggarakan Program Pendidikan untuk Guru Nauru	44

3.2. Memberikan Penghargaan Beasiswa Australia	51
3.3. Mendirikan Desa Belajar Nauru	57
3.3.1 Mendirikan Sekolah Menengah Nauru	58
3.3.2 Mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknis.....	59
3.3.3 Mendirikan Universitas Pasifik Selatan.....	65
3.4. Menempatkan Penasehat Teknis untuk Membantu Kementerian Pendidikan Nauru	68
BAB IV KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Diplomasi Multijalur.....	25
Gambar 2.1 Peta Wilayah Australia Dan Pasifik Selatan.....	31
Gambar 3.1 Situasi Kegiatan Belajar Program <i>Nauru Teacher Education Project</i> di Pusat Pembelajaran <i>UNE</i> , Nauru.....	49
Gambar 3.2 Publikasi <i>Nauru Teacher Education Project</i> oleh <i>University of New England</i>	53
Gambar 3.3 Publikasi Media Nauru Terkait Program <i>Australia Awards Scholarship</i>	58
Gambar 3.4 Publikasi <i>Twitter</i> Pemerintah Nauru Terkait <i>Australia Awards Scholarship</i>	59
Gambar 3.5 Murid-Murid Nauru yang Lulus dalam Program Sertifikasi <i>APTC</i> .	63
Gambar 3.6 Publikasi Media Loop, Nauru Terkait Pengesahan Bangunan <i>TVET</i>	65
Gambar 3.7 Publikasi <i>Twitter</i> untuk Pelatihan Vokasi di <i>TVET</i>	66
Gambar 3.8 Situasi di Hari Pengesahan Bangunan <i>USP</i> Tahun 2018.....	67
Gambar 3.9 Publikasi <i>Twitter</i> Terkait Pengesahan Bangunan <i>USP</i>	68
Gambar 3.10 Publikasi <i>Facebook</i> Mengenai Upacara Pembukaan <i>USP</i>	69

DAFTAR SINGKATAN

AOP	<i>Annual Operational Plan</i>
APTC	<i>Australia Pacific Training Coalition</i>
AUD	<i>Australia Dollar</i>
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
ICJ	<i>International Court of Justice</i>
MDG	<i>Millenium Development Goals</i>
NSDS	<i>Nauru Sustainable Development Strategy</i>
OEC	<i>Observatory of Economic Complexity</i>
PACTAM	<i>Pacific Technical Assistance Mechanism</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PIF	<i>Pacific Island Forum</i>
Polugri	Politik Luar Negeri
QCE	<i>Queensland Certificate of Education</i>
RPC	<i>Regional Processing Centre</i>
SDA	Sumber Daya Alam
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SPC	<i>South Pacific Commission</i>

TVET	<i>Technical and Vocational Education and Training</i>
UNE	<i>University of New England</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
USD	<i>United States Dollar</i>
USP	<i>University of South Pacific</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas pendidikan yang baik dapat dijadikan alat bagi negara untuk bisa bersaing dalam panggung internasional. Seperti Nelson Mandela pernah katakan dalam pidatonya, “Pendidikan merupakan senjata ampuh yang bisa digunakan untuk merubah dunia.”¹ Pendidikan merupakan prasyarat mendasar terciptanya kemajuan suatu negara, perluasan demokrasi, dan keadilan sosial. Tanpa perkembangan pendidikan yang baik, mustahil tercipta kemajuan negara secara signifikan. Dalam rumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs) butir poin keempat, Perserikatan Bangsa-Bangsa menuliskan bahwa, “Negara wajib memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk segenap masyarakat serta mempromosikan pembelajaran seumur hidup.”²

Pendidikan juga menjadi bahasan penting ketika berbicara konteks tantangan modernisasi zaman dan transformasi ekonomi global. Dunia sekarang mengalami permasalahan *peak youth era* –dimana lebih dari setengah populasi dunia berusia di bawah 30 tahun.³ Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah selanjutnya yang ditimbulkan dari penumpukan populasi usia muda ini adalah pengangguran – sebagai akibat dari kesenjangan keterampilan yang dimiliki masing-masing

¹ Valerie Strauss, “Nelson Mandela on the Power of Education,” The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/12/05/nelson-mandelas-famous-quote-on-education/?utm_term=.1cc9cb2aaa10, diakses tanggal 18 Maret 2019.

² United Nations, “Goal 4 .:. Sustainable Development Knowledge Platform”, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4>, diakses tanggal 18 Maret 2019.

³ United Nations Population Fund, “SWOP Report 2018,” UNFPA, <https://www.unfpa.org/swop-2018>, diakses tanggal 18 Maret 2019.

individu. Ini berarti sistem pendidikan perlu diperkaya untuk memperbesar skala penyerapan sumber daya manusia di ranah pekerjaan. Pendidikan sudah seharusnya dikemas negara sebagai sebuah motor pembangunan demi menciptakan tenaga kerja berkualitas dan layak saing.

Sementara pendidikan selama bertahun-tahun berada di garis depan agenda sosial global, tempatnya dalam agenda diplomatik perlu lebih ditonjolkan.⁴ Dengan tantangan globalisasi, urbanisasi, migrasi besar-besaran (oleh pengungsi, pencari suaka, termasuk yang dipindahkan secara paksa oleh krisis, konflik, atau bencana alam), langkah kerja sama antar negara semakin dibutuhkan. Di sinilah pentingnya sebuah upaya diplomasi yang membangun masyarakat dari segi pendidikan agar tercipta suatu sistem edukasi yang merata, adil dan berkualitas untuk masyarakat.⁵

Komitmen pemberian bantuan dari negara maju terhadap masyarakat di negara-negara kurang makmur pada akhirnya diterjemahkan ke dalam istilah diplomasi pembangunan.⁶ Konsep diplomasi pembangunan sendiri berada dalam payung diplomasi publik karena upayanya dirumuskan langsung oleh negara pendonor untuk menjangkau target masyarakat di negara lain. Salah satu instrumen *soft* yang diberikan negara sebagai bentuk bantuan pembangunan adalah pendidikan.⁷

⁴ Goldin Nicole, "What's Trending in Global Education Diplomacy," *Diplomatic Courier*, <https://www.diplomaticcourier.com/whats-trending-global-education-diplomacy/>, diakses tanggal 18 Maret 2019.

⁵ Ibid.

⁶ Karolina Zielińska, "Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations," *Journal of Historia i Polityka* Vol. 16, no. 16 (23) (2016): hlm 9.

⁷ Ibid.

Acap kali diplomasi pembangunan dalam bidang pendidikan terutama untuk negara-negara kecil masih dipandang sebelah mata karena dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah. Harga yang dikeluarkan untuk bantuan pendidikan tidak sebanding dengan respon balik terhadap pihak pendonor. Nyatanya, diplomasi pembangunan lewat bantuan pendidikan dapat memberi dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan ekonomi kawasan.⁸

Penelitian ini akan mengambil sampel Australia sebagai negara yang berhasil melaksanakan diplomasi pembangunan di ranah pendidikan. Salah satu negara target dari diplomasi pembangunan Australia adalah Nauru. Berpredikat sebagai negara republik terkecil di dunia serta salah satu negara dengan kandungan batuan fosfat terbaik, Nauru masih jauh tertinggal dalam segi pendidikan.⁹ Statistik penduduk memperkirakan populasi Nauru berada di kisaran angka 11.000 jiwa; terdiri dari penduduk asli yang disebut *Nauruan*, beberapa pendatang dari Mikronesia dan Pasifik Selatan, serta kumpulan para pencari suaka dan pengungsi.¹⁰

Hubungan bilateral antara Australia dan Nauru telah berlangsung dari tahun 2001 dan tertulis secara resmi dalam sebuah perjanjian bernama *The Pacific Solution*.¹¹ Dalam perjanjian ini Nauru sepakat untuk menjadi tuan rumah dari pusat penahanan pengungsi (*detention centre*) untuk para migran ilegal yang datang ke Australia via jalur laut. Sebagai timbal balik, Australia memberikan imbalan bantuan ekonomi terhadap pemerintah Nauru. Selama beberapa tahun

⁸ Colin Hindson, "Educational Aid in the South Pacific - A Look at Priorities", *Journal of University of South Pacific*, 1986, hlm 1.

⁹ J.W. Davidson, "*The Republic of Nauru*", *The Journal of Pacific History*, Australia (1968), hlm 145.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Department of Foreign Affairs and Trade Australia, "SCHEDULE TO THE NAURU - AUSTRALIA PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT," Australia (2001), hlm 3.

berjalan, pusat penahanan pengungsi ini menuai banyak kritik dari kacamata global karena dianggap merusak kesehatan fisik dan mental para korban migran.¹² Akhirnya tahun 2007 perjanjian *The Pasific Solution* dihentikan sementara seiring dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia. Tepatnya pada bulan Desember 2007, tahanan pengungsi terakhir telah meninggalkan Nauru. Sebagai akibatnya, Australia memotong sejumlah dana bantuan sehingga pendapatan negara Nauru pun kian merosot. Setahun setelahnya kedua pemerintah kemudian mengadakan diskusi terkait program bantuan luar negeri yang menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan untuk Nauru. Terbitlah beberapa gagasan dari pemerintah Australia, seperti revitalisasi industri fosfat, pendirian industri perbaikan kapal penangkap ikan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah untuk menarik manufaktur asing datang ke Nauru.¹³

Tahun 2012 Australia kembali kewalahan mengatasi peningkatan jumlah pendatang pencari suaka. Para pencari suaka di dominasi oleh masyarakat dari wilayah konflik seperti Irak, Suriah, Sudan, Afganistan, dan Somalia.¹⁴ Masyarakat Australia mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan imigran karena dianggap mulai mengancam keamanan negara. Atas desakan tersebut pemerintah Australia kemudian mengaktifkan kembali pusat penahanan pengungsi yang sempat dibangun di Nauru pada tahun 2001. Pusat penahanan pengungsi ini kemudian diberi nama *Regional Processing Centre (RPC)*. Merujuk pada laporan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT),

¹² United Nation High Commissioner for Refugees, "UNHCR - UNHCR Reports Harsh Conditions and Legal Shortcomings at Pacific Island Asylum Centres", <https://www.unhcr.org/52947ac86.html>, diakses tanggal 19 Maret 2019.

¹³ Willemez, "Nauru: A Lesson in Failure," Center for International Maritime Security, <http://cimsec.org/naru-lesson-in-failure/14205>, diakses tanggal 19 Maret 2019.

¹⁴ Ibid.

hadirnya kembali RPC pada tahun 2012 adalah penyumbang presentase terbesar untuk pendapatan Nauru.¹⁵

Statistik pendapatan negara yang meningkat sebagai dampak dari didirikannya kembali RPC oleh pemerintah Australia, tidak serta merta menandakan bahwa kesejahteraan Nauru meningkat. Tantangan terbesar pemerintah Nauru masih terletak pada kualitas sumber daya manusia demi perkembangan keberlanjutan negara. Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah keterbukaan akses pendidikan. Bekal pendidikan memang bukan suatu proses singkat, tapi dengan kontinuitas layanan edukasi diharapkan tercipta kemandirian negara dalam aspek ekonomi dan berbagai aspek lainnya secara jangka panjang. Atas alasan inilah Australia sepakat untuk melakukan upaya-upaya diplomasi pembangunan terhadap masyarakat Nauru dalam bidang pendidikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara garis besar, ada tiga karakteristik permasalahan paling umum yang terjadi di Nauru; iklim, SDA dan SDM, serta geografis. Pertama, perubahan iklim serta risiko bencana alam. Naiknya permukaan laut dan bencana kekeringan mendadak mengancam ketersediaan air minum dan keamanan pangan di Nauru. Ditambah lagi sektor tambang fosfat yang menjadi sumber daya alam utama negara menghasilkan polusi debu, perubahan pola angin, dan kenaikan suhu. Meningkatnya penyakit di masyarakat jadi efek samping industri tambang yang tidak bisa dielak. Kedua, sumber daya manusia dan finansial. Secara finansial, perekonomian Nauru sangat bergantung pada dana bantuan eksternal dan

¹⁵ Department of Foreign Affairs and Trade Australia, "Overview of Australia's Aid Program to Nauru - Department of Foreign Affairs and Trade", <https://dfat.gov.au/geo/nauru/development-assistance/pages/development-assistance-in-nauru.aspx>, diakses tanggal 19 Maret 2019.

pendapatan tidak menentu dari hasil tambang fosfat. Situasi perekonomian Nauru diperparah dengan tingginya tingkat pengangguran di usia produktif dan banyaknya presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keterbatasan finansial menyebabkan pemerintah kurang mampu mengalokasikan dana ke akses pelatihan dan pengembangan keahlian dalam berbagai sektor. Ketiga, letak geografis negara. Isolasi geografis Nauru berimplikasi pada kendala transportasi, dengan hanya satu perusahaan pesawat yang melayani negara. Tidak heran jika akses bantuan luar negeri terhadap Nauru sedikit banyak terhambat.¹⁶ Karena posisi strategisnya yang berbatasan dekat, Australia menjadi salah satu rekan diplomasi dan pendonor terbesar untuk perkembangan Nauru.

Dapat disimpulkan dari ketiga karakteristik permasalahan tersebut bahwa Nauru memiliki hambatan akses terhadap dunia luar. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nauru menggantungkan harapannya pada bantuan eksternal demi keberlanjutan negara.¹⁷ Di sisi lain, peneliti menemukan ada setidaknya tiga premis yang menyebabkan Nauru dinilai penting dari kaca mata Australia –yang untuk itu lah kedua negara sepakat berdiplomasi.

Pertama, pasca dibukanya kembali pusat penahanan yang diberi nama *Regional Processing Centre* (RPC) di Nauru pada tahun 2012, pemerintah Australia menyepakati langkah serius untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada para tahanan imigran. Australia kemudian memberikan komando kepada Departemen dalam Negeri untuk bertanggung jawab atas

¹⁶ United Nations Children’s Fund, “Situation Analysis of Children in Nauru,” Fiji (2017), hlm 16.

¹⁷ Tara Jackson, “The Success of Humanitarian Aid to Nauru,” *The Borgen Project*, <https://borgenproject.org/humanitarian-aid-to-nauru/>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

permasalahan imigrasi, kewarganegaraan, dan kontrol perbatasan.¹⁸ Penggunaan fasilitas pusat penahanan merupakan bagian dari kebijakan penahanan migran di Australia. Kedua pemerintah menandatangani nota kesepahaman awal terkait perlindungan para pencari suaka yang ditransfer dari Australia ke Nauru. Dalam nota tersebut pemerintah Australia memberi istilah “*illegal maritime arrivals*” kepada para pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia melalui jalur laut.¹⁹

Diplomasi pembangunan dalam bidang pendidikan yang diberikan Australia merupakan upaya perlindungan HAM baik untuk warga negara Nauru, juga untuk para pencari suaka di RPC. Pendidikan memang menjadi urgensi utama perkembangan manusia di Nauru.²⁰ Kualitas manusia yang buruk otomatis berimplikasi pada tingginya presentase angka pengangguran serta mandetnya perekonomian negara. Di sisi lain, berkaca pada permasalahan yang sebelumnya terjadi kurun waktu 2001-2008 (terkait pelanggaran HAM di pusat penahanan), Australia juga ingin memperbaiki citra negaranya di mata internasional.²¹ Program bantuan dari Australia sekaligus menjadi alat untuk menyebarkan pengaruh positif dan membenahi reputasi negara.

Kedua, Australia dan negara-negara Pasifik Selatan memiliki histori relasi yang sudah berlangsung lama sebagai akibat dari kedekatan geografis. Relasi diplomatik tersebut salah satunya tertuang dalam Agenda Pengembangan

¹⁸ Department of Foreign Affairs and Trade, “Memorandum of Understanding between the Republic of Nauru and the Commonwealth of Australia, Relating to the Transfer to and Assessment of Persons in Nauru, and Related Issues”, <https://dfat.gov.au/geo/nauru/pages/memorandum-of-understanding-between-the-republic-of-nauru-and-the-commonwealth-of-australia-relating-to-the-transfer-to-and.aspx>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

¹⁹ Ibid.

²⁰ United Nations Children’s Fund, op.cit, hlm 4.

²¹ Dane Moores, “Why Australia’s Aid Is a Key Soft-Power Asset,” Australian Strategic Policy Institute, <https://www.aspistrategist.org.au/why-australias-aid-is-a-key-soft-power-asset/>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

Pendidikan dan Keterampilan Pasifik – Tahun 2014. Agenda tersebut memuat komitmen Australia untuk menyediakan akses pendidikan terhadap masyarakat di Pasifik Selatan, memastikan kualitas edukasi demi memangkas tingkat buta huruf dan angka, memastikan kaum muda memiliki peluang untuk meningkatkan keterampilan, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi lewat sekolah kejuruan atau universitas.²²

Ketiga, Australia memiliki predikat sebagai negara pendonor terbesar untuk kawasan Pasifik Selatan.²³ Masing-masing pihak (Australia dan negara-negara Pasifik Selatan) memiliki keterikatan demi melindungi kepentingannya masing-masing. Bagi Kepulauan Pasifik, Australia adalah *most favoured friend* berkat investasi dan bantuan dana untuk pengembangan infrastruktur, sektor publik, dan pengembangan manusia.²⁴ Sedang dari kacamata Australia, ada agenda politik penting yang bisa dibawa menyinggung soal Pasifik Selatan. Dalam beberapa kesempatan kampanye memperebutkan kursi di Dewan Keamanan PBB, pemerintah Australia membawa suara Kepulauan Pasifik (yang suaranya benar-benar penting dalam ranah ini). Australia berjanji, sebagai rekan diplomasi terkuat, pihaknya akan mewakili kepentingan Pasifik di panggung internasional terutama dalam agenda iklim dan pengembangan manusia.²⁵

²² Department of Foreign Affairs and Trade, “Pacific Education and Skills Development Agenda,” June (2014): 1–15, <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/pesda-2011.pdf>, diakses pada 21 Juni 2019.

²³ Stephen Dziedzic, “Which Country Gives the Most Aid to Pasific Island Nations? The Answer Might Surprise You,” *Abc.Net.Au*, <https://www.abc.net.au/news/2018-08-09/aid-to-pacific-island-nations/10082702>, diakses tanggal 21 Maret 2019.

²⁴ Willemez, *op.cit.*

²⁵ Thom Woodroffe, “Australia Has Neglected Its Relationship with the Pacific – but That Can Change,” *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/apr/25/australia-has-neglected-its-relationship-with-the-pacific-but-that-can-change>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

Diplomasi pembangunan Australia yang dilaksanakan dengan bantuan pendidikan sedikit banyak telah membantu Nauru menghadapi tantangan “Generasi yang hilang”; terdiri dari sejumlah besar masyarakat usia produktif yang kecewa akibat menganggur (karena keterbatasan keterampilan dan peluang usaha).²⁶ Bukan hanya permasalahan serapan tenaga kerja, pendidikan dasar masyarakat Nauru juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat tingkat melek huruf dan partisipan pelajar yang merosot tiap jenjang. Bahkan anak-anak disabilitas sebagian besar absen dari sistem pendidikan.²⁷ Solusi bantuan pendidikan berada di bawah pengawasan *DFAT* Australia bersama dengan Kementerian Pendidikan Nauru.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada upaya pemerintah Australia di bawah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*DFAT*) dalam memajukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Nauru. Selain karena pendidikan masuk dalam poin MDG butir dua, “Mencapai pendidikan dasar universal bagi perempuan dan laki-laki”,²⁸ Australia juga berkomitmen dalam dunia pendidikan dengan langkah pemberian asistensi, beasiswa, dan bantuan dana kepada negara-negara miskin berkembang.²⁹ Dari kacamata Nauru, ketika permasalahan iklim dan geografis berada diluar kendali negara, salah satu upaya yang dapat negara kembangkan untuk keberlanjutan ekonomi adalah melalui pembangunan manusia dari segi pendidikan.

²⁶ United Nations Children’s Fund, *op.cit*, hlm 56.

²⁷ United Nations Children’s Fund, *op.cit*, hlm 57.

²⁸ MDG Monitor, “Millennium Development Goals - UN Millennium Project”, <https://www.mdgmonitor.org/>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

²⁹ Department of Foreign Affairs and Trade Australia, “Overview of Australia’s Aid Program to Nauru - Department of Foreign Affairs and Trade”, *op.cit*.

Tahun penelitian dibatasi pada kurun waktu 2013-2018. Tahun 2013 menjadi penanda ketika Australia kembali menaikkan anggaran diplomasi pembangunan terhadap Nauru pasca dibukanya kembali pusat penahanan imigran (RPC). Tahun 2018 menjadi batas akhir penelitian bertepatan dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknis (*TVET*) dan Kampus Nauru yang diberi nama *University of South Pasific (USP)*.³⁰

Dari sekian banyak aktor pemerintah yang terbukti berhasil melaksanakan diplomasi pembangunan, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai relasi Australia dan Nauru karena Australia merupakan negara pendonor bantuan pembangunan terbesar di kawasan Pasifik. Upaya diplomasi pembangunan Australia juga menjadi langkah pembeda pendekatan *G to P (government to people / pemerintah ke masyarakat)* dan *P to P (people to people / masyarakat ke masyarakat)* jika dibandingkan dengan aktor pendonor besar lainnya, seperti Tiongkok (yang lebih condong memberikan bantuan pembangunan dari segi infrastruktur). Selain itu, Nauru yang merupakan negara republik terkecil di dunia punya coretan sejarah yang cukup panjang dengan Australia. Dengan fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisa upaya-upaya diplomasi pembangunan Australia terhadap Nauru dalam bidang pendidikan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi**

³⁰ USP Communications Team, “USP Opens New Nauru Campus: USP News,” The University of the South Pasific, <https://www.usp.ac.fj/news/story.php?id=2781>, diakses tanggal 20 Maret 2019.

pembangunan Australia terhadap Nauru dalam bidang pendidikan tahun 2013-2018?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan diplomasi pembangunan antar pemerintah dua negara didasarkan pada pemahaman bahwa pendekatan *soft* penting dilakukan negara demi membentuk citra positif, menarik atensi internasional, serta memberikan pengaruh ke masyarakat.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian **bagaimana upaya-upaya diplomasi pembangunan Australia terhadap Nauru dalam bidang pendidikan?** Dari analisa diharapkan muncul perspektif baru yang menjadi pembeda langkah diplomasi pembangunan yang dilakukan Australia dengan aktor lainnya seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Kontribusi sebagai sumber referensi terhadap penelitian lebih lanjut mengenai diplomasi pembangunan atau diplomasi publik Australia terhadap Nauru;
2. Memberi masukan kepada pemerintah, akademisi, dan atau institusi pendidikan mengenai pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya pengembangan kualitas manusia;
3. Mendorong penggunaan *soft diplomacy* sebagai langkah mempererat relasi dalam hubungan internasional.

1.4 Kajian Literatur

Peneliti menggunakan tiga sumber literatur sebagai kajian pembandingan dan pendukung analisis variabel. Literatur pertama adalah sebuah artikel yang termuat dalam *Australian Journal of International Affairs* dengan judul “*Realising Australia’s International Education as Public Diplomacy*” karya penulis Caitlin Byrne dan Rebecca Hall. Penulis menyatakan bahwa pendidikan internasional Australia berfungsi sebagai alat diplomasi publik yang dilakukan pemerintah untuk menyebarkan pengaruh kepada masyarakat di negara target. Langkah diplomasi publik lewat jalur pendidikan juga sejalan dengan prioritas kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Australia. Lewat hubungan pengembangan intelektual, tercipta reputasi baik bagi suatu bangsa –bahkan kedudukan negara dapat meningkat dalam skala regional dan global. Implikasi ini diberi arti oleh Byrne sebagai esensi dari *soft power*. Temuan lain menurut penulis menunjukkan bahwa ada ruang untuk kepemimpinan diplomasi publik yang lebih koheren serta peningkatan evaluasi dan dialog yang diperluas bagi masyarakat.³¹

Artikel Byrne dan Hall lebih mengarah pada pemaparan opini kritis penulis terkait langkah pemerintah Australia; yang walaupun sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari pendidikan internasional, namun belum mampu mewujudkan potensi *soft power* yang melekat dalam kedalaman interaksi antar aktor. Artikel ini juga tidak mengambil contoh negara spesifik yang menjadi target diplomasi publik Australia.

³¹ Caitlin Byrne and Rebecca Hall, “Realising Australia’s International Education as Public Diplomacy,” *Australian Journal of International Affairs*, (Sydney 2013), hlm 4.

Literatur kedua adalah artikel jurnal karya penulis Evelyn Coxon dan K. Muncceb yang berjudul “*The Global Education Agenda and the Delivery of Aid to Pacific Education*”. Artikel ini menjelaskan bahwa kemajuan pendidikan di wilayah Pasifik merupakan mekanisme kritis untuk pengentasan kemiskinan dan pencegahan konflik dalam skala regional dan nasional. Penulis menyertakan rancangan dasar proyek pendidikan yang diidentifikasi penting berdasarkan realita kontekstual di negara-negara kecil di Pasifik.

Berbeda dengan penelitian ini, artikel Evelyn Coxon tidak menyinggung langkah diplomasi pembangunan yang dilakukan oleh negara pendonor, melainkan hanya membahas agenda pendidikan global yang dilakukan oleh badan pembangunan internasional. Penulis juga lebih menekankan pada strategi pengembangan intelektual yang tepat sasaran di Kepulauan Pasifik, namun tidak mendalami secara rinci karakteristik kebutuhan pendidikan di Nauru.

Literatur ketiga adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Karolina Zielińska dengan judul “*Development Diplomacy, Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations.*” –dimuat dalam jurnal *Historia i Polityka*. Fokus dari literatur ini terbagi menjadi dua. Pertama, penulis berupaya untuk mendefinisikan kembali konsep diplomasi pembangunan (diplomasi yang dilakukan melalui bantuan pembangunan) sebagai subbagian dari diplomasi publik yang diwujudkan pemerintah negara donor melalui kekuatan *soft power*. Beberapa sumber teoritis juga dikaitkan kembali dan direfleksikan ulang untuk menghasilkan visi yang

berkesinambungan tentang peran diplomasi pembangunan dalam diplomasi publik.³²

Kedua, penulis menaruh fokus pada peran diplomasi pembangunan dalam konteks tujuan kebijakan luar negeri. Refleksi teoretis tentang pembahasan ini diikuti oleh contoh-contoh ilustratif dari dokumen, tindakan dan penelitian, serta hubungan praktis antara bantuan pembangunan dan tujuan kebijakan luar negeri dibuat. Ini mengarah pada kesimpulan tentang kepraktisan dan efektivitas bantuan pembangunan di bawah diplomasi publik dan juga di bawah payung kebijakan luar negeri.³³ Untuk memperjelas implementasi teori, penulis mengambil contoh diplomasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Israel terhadap masyarakat di daerah Sub-Saharan Afrika. Diplomasi pembangunan oleh Israel mengarah pada bantuan teknis dari segi pendidikan, pelatihan, konseling, dan transfer keahlian dengan tujuan mencari sekutu baru dan memperkuat hubungan bilateral antara Israel dan lebih dari 30 negara di Sub-Saharan Afrika.

Referensi artikel jurnal Karoline mendukung bahasan variabel penelitian ini terkait diplomasi pembangunan yang dilakukan oleh Australia terhadap Nauru. Peneliti dapat merujuk pada pandangan baru bahwa diplomasi pembangunan (di bawah payung diplomasi publik) oleh Australia bertujuan menciptakan citra positif negara serta memberi pengaruh kepada publik di negara sasaran, Karoline tidak menyinggung Australia sebagai salah satu negara yang berhasil melaksanakan diplomasi pembangunan.

³² Karolina Zielińska, "Development Diplomacy. Development Aid as a Part of Public Diplomacy in the Pursuit of Foreign Policy Aims: Theoretical and Practical Considerations," *Historia i Polityka* 16, no. 16 (2016): hlm 3.

³³ Ibid.

Dari tiga sumber literatur tersebut masih belum ditemukan bahasan spesifik mengenai upaya-upaya diplomasi pembangunan dari Australia ke Nauru dengan periode waktu 2013-2018. Jurnal pertama hanya membahas diplomasi pendidikan internasional Australia sebagai salah satu upaya diplomasi publik pemerintah dan merupakan esensi *soft power* negara, tanpa menyinggung bahasan diplomasi pendidikan terhadap Nauru. Jurnal kedua menjabarkan realita dan kebutuhan pendidikan di wilayah Pasifik serta agenda pendidikan oleh organisasi internasional. Jurnal ketiga memberikan gambaran besar terkait diplomasi pembangunan sebagai salah satu bentuk diplomasi publik yang dilakukan pemerintah demi mencari aliansi dan menarik suara publik. Jurnal terakhir mengambil contoh diplomasi pembangunan (dalam fokus teknis pendidikan) yang dilakukan Israel kepada 30 negara di Sub-Saharan Afrika. Dari seluruh kelebihan dan keterbatasan tiga sumber literatur, maka dapat dijustifikasi bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal.

1.5 Kerangka Pemikiran

Studi Ilmu Hubungan Internasional merupakan cabang ilmu bersifat multidisipliner. Oleh sebab itu, dalam mengkaji sebuah permasalahan dibutuhkan beberapa teori dan konsep yang disusun dalam sebuah kerangka pemikiran. Peneliti akan menganalisa kasus dengan menggunakan teori dan konsep pluralisme dalam hubungan internasional, politik luar negeri (polugri), diplomasi multijalur, diplomasi publik, dan diplomasi pembangunan.

Pada awal perkembangannya, pakar Hubungan Internasional berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, serta aktor bukan negara yang

perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Beberapa teori dalam Hubungan Internasional kemudian berkembang berdasarkan konsentrasi aktor. Tiga perspektif dasar berdasarkan aktor dalam Hubungan Internasional diantaranya realis (konsentrasi pada aktor negara), pluralis (konsentrasi pada aktor negara dan non-negara), dan strukturalis (konsentrasi pada struktur dari sebuah sistem).

Pluralisme dalam Hubungan Internasional adalah teori pengantar yang menjelaskan bahwa aktor non-negara juga diakui dalam hubungan internasional. Pluralisme pertama kali dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye tahun 1971 dalam artikel jurnal yang berjudul "*Transnational Relations and World Politics: An Introduction*".³⁴ Dua fondasi penting terkait pluralisme adalah; Pertama, pluralisme menyatakan bahwa negara bukanlah aktor tunggal; ada hubungan yang lebih kompleks dari sekedar hubungan antar negara, baik secara bilateral, multilateral, regional, dan global. Bukan hanya interaksi antar negara yang penting, tapi juga dimensi hubungan transnasional dari aktor-aktor non-negara yang beroperasi lintas batas. Kedua, pluralisme menolak rancangan undang-undang dan agenda politik internasional yang didominasi oleh keamanan dan militer. Fondasi pluralis menyatakan negara dan aktor non-negara punya peranan dan kontribusi yang sama penting bagi perpolitikan dunia.³⁵

Politik Luar Negeri (Polugri) adalah roda penggerak negara menjalankan politik internasional. Menurut Norman J. Padelford dan George A. Lincoln dalam bukunya yang berjudul "*The Dynamics of International Politics*", Polugri adalah

³⁴ Joseph S. Nye, Jr. and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction", (Harvard: Summer 1971), hlm. 329-330.

³⁵ Joseph S. Nye, Jr. and Robert O. Keohane, op.cit.

elemen kunci dari sebuah proses suatu negara menerjemahkan tujuan dari kepentingannya untuk dipahami secara luas dan di aplikasikan ke dalam tindakan nyata demi pencapaian target dan tujuan.³⁶ Polugri merupakan bagian dari kebijakan politik dalam negeri yang mengandung simpulan dari prinsip-prinsip, kepentingan nasional, dan tujuan yang di rumuskan pemerintah dalam rangka menjalankan relasinya dengan negara lain. Dalam penentuan arah Polugri, pemerintah selalu berkaca pada batas kemampuan negara serta realita lingkungan eksternal.³⁷ Hubungan non-politik juga masuk dalam bahasan Polugri. Perumusan Polugri biasa dilakukan pemerintah dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, namun pelaksanaannya akan diserahkan pada sektor-sektor terkait. Aksi pemerintah Australia dalam memberikan bantuan pembangunan di bidang pendidikan untuk masyarakat Nauru merupakan bentuk praktik diplomasi hubungan internasional dengan merujuk pada rumusan Polugri masing-masing negara.

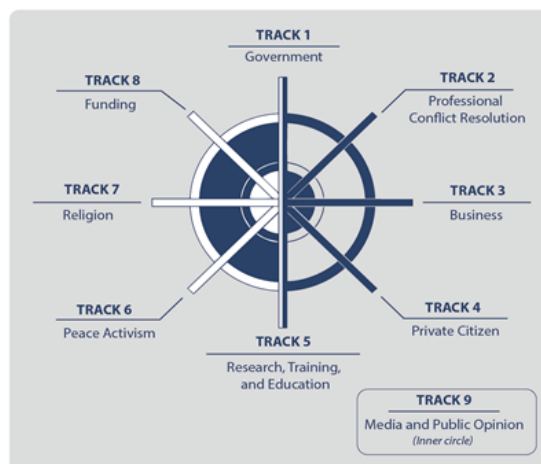
Dalam rangka mewujudkan kebijakan Polugri, negara mengambil langkah diplomasi. Selain untuk menjaga relasi dengan negara lain, diplomasi juga merupakan aktivitas wajib bagi negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global. Studi hubungan internasional mengklasifikasikan diplomasi ke dalam dua jalur; jalur pertama dijalankan antar pemerintah dengan melibatkan kepala negara atau menteri luar negeri –serta hubungannya bersifat formal; sedang jalur kedua adalah diplomasi yang dijalankan oleh aktor non-negara, sifatnya informal. Diplomasi jalur kedua dikembangkan dan dispesifikkan berdasarkan

³⁶ Norman J. Padelford and George A. Lincoln, "The Dynamics of International Politics", (New York: Macmillan Co, 1976), hlm 469.

³⁷ Ibid.

level pendekatannya dalam masyarakat. Pembagian jalur dibagi menjadi sembilan bagian dan diberi istilah diplomasi multijalur. Pembagian aktor dalam diplomasi multijalur dimaksudkan untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dalam analisa hubungan internasional.³⁸

1.1. Bagan Diplomasi Multijalur



Sumber: Institute for Multitrack Diplomacy, <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>

Bagan diplomasi multijalur diatas menjelaskan bahwa ada sembilan elemen subsistem dalam diplomasi multijalur, diantaranya pemerintah; profesional; bisnis; individu (masyarakat); badan penelitian, pelatihan, dan pendidikan; aktivis; agama; pendanaan; media dan opini publik.³⁹

Diplomasi multijalur dalam penelitian ini akan difokuskan pada lima jalur. Pertama adalah **Jalur 1** dengan perwakilan negara Australia dan negara Nauru sebagai aktor. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah adalah garda terdepan pelaksanaan diplomasi pembangunan. Pemerintah-lah yang menentukan fokus,

³⁸ Louise Diamond and John McDonald, "Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace", (Kumarian Press: April 1996).

³⁹ Louise Diamond and John McDonald, op.cit.

target, dan skema pelaksanaan dari bantuan pendidikan, termasuk praktik kerja sama yang dijalin dengan aktor lain (lembaga pendidikan dan individu masyarakat). Kedua adalah **Jalur 3** dengan aktor bisnis. Aktor ini bergerak dalam bidang komersil dengan tujuan mencari *profit*. Bisa direpresentasikan dalam bentuk perusahaan atau pedagang. Diikuti oleh **Jalur 4** dengan individu (masyarakat) sebagai aktor target pelaksanaan diplomasi publik. Individu (masyarakat) memiliki peranan substansial sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh aktor Jalur 1 (pemerintah). Selain itu individu (masyarakat) juga memiliki kapasitas untuk menyebarkan informasi serta opini terkait langkah diplomasi pembangunan lewat media sosial. Selanjutnya **Jalur 5** dengan lembaga penelitian, pelatihan, dan pendidikan sebagai aktor. Ketiga lembaga tersebut berfungsi sebagai jembatan penghubung pelaksanaan kebijakan luar negeri pemerintah kepada masyarakat. Terakhir adalah **Jalur 9**; yaitu media dan opini publik. Di era digital, peran media dapat mempermudah pengukuran indikator secara terbuka dan *real time*. Kemudahan akses oleh pihak-pihak terkait sangat penting bagi target pengembangan yang tepat sasaran.

Diplomasi publik adalah salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan terutama (tapi tidak terbatas) oleh negara demokrasi. Bergesernya pola hubungan internasional telah meningkatkan ketertarikan aktor dan lembaga non-pemerintah untuk terlibat dalam diplomasi dan pengambilan kebijakan. Selain itu, muncul pula kesadaran yang lebih mendalam bahwa negara saling bergantung dan memiliki keterikatan (*interconnectedness*) satu sama lain yang semakin kental.⁴⁰

Diplomasi publik adalah tentang membangun hubungan: memahami kebutuhan

⁴⁰ Sukawarsini Djelantik, "Diplomasi antara Teori dan Praktik", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 46.

negara lain, kebudayaan dan masyarakat, mengkomunikasikan cara pandang, mengkoreksi mispersepsi, mencari titik temu antar aktor dengan tujuan mencapai kesepakatan satu titik.⁴¹

Diplomasi publik dilandaskan pada premis jika citra dan reputasi suatu negara adalah barang publik yang dapat dihasilkan melalui interaksi individual.⁴² Dampak dari diplomasi publik terbagi ke dalam beberapa hierarki. Pertama, meningkatkan keakraban publik terhadap suatu negara (membuat publik berasumsi, memperbaharui citra, merubah perspektif buruk publik terhadap suatu negara). Kedua, meningkatkan apresiasi publik terhadap suatu negara (menciptakan persepsi positif, membuat publik melihat isu kepentingan global melalui persepsi yang sama). Ketiga, melibatkan publik dengan suatu negara (memperkuat hubungan lewat reformasi pendidikan / kerja sama saintifik, melihat sebuah negara sebagai tujuan wisata atau tujuan studi yang menarik, mendorong publik untuk membeli produk khas suatu negara, membuat publik memahami dan mengikuti nilai atau ideologi yang dianut suatu negara). Keempat, mempengaruhi publik (untuk tujuan investasi, mendukung posisi negara, mendukung situasi politik tertentu).⁴³

Konsep diplomasi pembangunan berada dalam payung diplomasi publik dengan aktor pertama yang terlibat adalah pemerintah mengarah kepada target masyarakat di negara lain. Menurut Bagiński dalam bukunya yang berjudul

⁴¹ Mark Leonard and Conrad Smewing, "Public Diplomacy", (Foreign Policy Centre: June 2002), hlm 23.

⁴² Ibid, hlm 25.

⁴³ Mark Leonard and Conrad Smewing, *op.cit.*

“*Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance*”,⁴⁴ bentuk bantuan pembangunan yang diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima dapat disistemasi sebagai berikut; **bantuan keuangan** (berupa sumbangan, pinjaman, keringanan hutang), **bantuan material** (berupa barang konsumsi, investasi, makanan), terakhir adalah **bantuan teknis** (pendidikan, pelatihan, konseling, keahlian).⁴⁵ Tiga karakteristik bantuan tersebut direlasikan dalam landasan konsep diplomasi pembangunan dengan tujuan membentuk opini dan citra positif bagi negara pendonor.⁴⁶

Diplomasi pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses membangun citra positif negara di luar negeri baik secara bilateral maupun global – berdasarkan transfer bantuan yang ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara berkembang. Sumber teoritis yang ada menunjukkan bahwa sebenarnya diplomasi pembangunan dapat dilegitimiasi sebagai bagian dari diplomasi baru (*new diplomacy*) karena memiliki kesamaan dalam satu atau lebih ciri khas “diplomasi publik baru”, seperti; praktiknya yang dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga entitas non-negara; didasarkan pada penggunaan *soft power*; komunikasi dua arah, manajemen informasi yang kredibel; dan berorientasi jangka panjang dan jangka pendek.⁴⁷

Pemberian bantuan yang bertujuan positif serta lebih melibatkan hubungan timbal balik antar dua arah, semakin menciptakan relasi diplomatik yang kondusif sekaligus meningkatkan kekuatan *soft* pendonor dalam mendukung diplomasi publiknya. Dalam buku *The Future Power*, penulis Joseph Nye merefleksikan

⁴⁴ Bagiński, Czaplicka, Szczyciński, “International Cooperation for Development”, Warszawa: 2009, hlm 23.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Karolina Zielińska, op.cit, hlm 9.

⁴⁷ Karolina Zielińska, op.cit, hlm 13.

hasil akhir bantuan ke dalam empat perspektif. Pertama, bantuan dikatakan **relevan** jika bisa menjadi solusi spesifik dari permasalahan yang dialami negara penerima donor. Terkhusus bagi Nauru, maka jawaban atas permasalahan pembangunan manusia terletak pada relevansi upaya bantuan dalam bidang pendidikan. Kedua, bantuan akan berjalan **efektif** jika implementasi proyek berdasarkan konsensi kedua pihak dapat menjawab tantangan populasi lokal secara dinamis. Keterlibatan aktor non-pemerintah sifatnya sangat penting untuk masukan kerangka upaya yang lebih komprehensif. Ketiga, bantuan dikatakan **efisien** ketika transfer dana oleh pendonor dialokasikan terstruktur kepada pihak yang bertanggung jawab. Transfer dana bantuan yang sistematis mengurangi indikasi terjadinya kebocoran anggaran. Terakhir, bantuan harus tetap **termonitor** secara transparan. Fungsi media membantu pihak-pihak terkait dalam evaluasi kinerja upaya pembangunan. Selain itu, publikasi media juga menjadi tombak negara pendonor untuk mengangkat citra positif di mata internasional.⁴⁸

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis; yakni metode penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta menjadi objek penelitian. Data yang didapat, dikumpulkan, dikelompokkan, diinterpretasikan, dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai realita keadaan pada objek yang diteliti.

Data dianalisis sesuai dengan kerangka teori untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari

⁴⁸ Joseph S. Nye, "The Future Power", (Public Affairs: 2011), hlm 57.

studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel, dokumen, laporan, jurnal, referensi *media online* dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi dalam empat bab pembahasan. **Bab 1** berisi pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. **Bab 2** akan menjelaskan relasi Australia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan serta elaborasi lebih dalam terkait hubungan diplomatik Australia dan Nauru. **Bab 3** akan dijabarkan analisis upaya-upaya diplomasi pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan Australia terhadap Nauru kurun waktu 2013-2018. Terakhir, **bab 4** berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan.